



TRANSFORMASI SUBAK SEMBUNG SEBAGAI LANSKAP BUDAYA PERKOTAAN: EKOWISATA, TRI HITA KARANA, DAN NEGOSIASI RUANG DI DENPASAR, 2012–2024

**Putu Dyah Pradnya Paramitha¹, Daffa Kimi Khayru², Muhammad Arifin Ilham³, I Made
Chandra Yoga Astawa⁴, Raditya Ananda Kusuma⁵, Perdi Pratama⁶**

[¹pradnya.paramitha@unud.ac.id](mailto:pradnya.paramitha@unud.ac.id), [²kimidaffa@gmail.com](mailto:kimidaffa@gmail.com), [³blacpanter16@gmail.com](mailto:blacpanter16@gmail.com),
[⁴yogachandra.at@gmail.com](mailto:yogachandra.at@gmail.com), [⁵raditya.kembang46@gmail.com](mailto:raditya.kembang46@gmail.com), [⁶perdipratama058@gmail.com](mailto:perdipratama058@gmail.com)

Universitas Udayana

Abstrak

Penetapan Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2012 membawa perubahan terhadap cara pandang dan pengelolaan Subak di Bali, termasuk Subak Sembung di Kota Denpasar. Di tengah meningkatnya tekanan urbanisasi, alih fungsi lahan, dan perkembangan pariwisata, Subak Sembung menghadapi tantangan untuk mempertahankan fungsi agraris sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi Subak Sembung pada periode 2012–2024 dengan menitikberatkan pada proses adaptasi kelembagaan, pengembangan ekowisata, serta negosiasi ruang dalam menjaga keberlanjutan lanskap budaya perkotaan. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui wawancara sejarah lisan dengan pengurus dan anggota Subak, observasi lapangan, dokumentasi, serta kajian terhadap berbagai sumber tertulis, kemudian dianalisis secara kronologis untuk menjelaskan hubungan antara kontinuitas dan perubahan dalam pengelolaan Subak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Subak Sembung bukan merupakan pergeseran dari pertanian menuju pariwisata, melainkan proses adaptasi kelembagaan yang memungkinkan berkembangnya fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis tanpa menghilangkan identitas agraris kawasan. Pengembangan ekowisata, pemanfaatan teknologi, penerapan awig-awig, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor yang saling melengkapi dalam mempertahankan keberlanjutan Subak di tengah dinamika perkembangan Kota Denpasar. Penelitian ini memperkaya historiografi Subak dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan institusi tradisional lebih ditentukan oleh kemampuan masyarakat lokal dalam menegosiasikan berbagai kepentingan pembangunan daripada oleh pengakuan internasional semata.

Kata Kunci: Subak Sembung, Transformasi, Sejarah Sosial, Ekowisata, UNESCO.

Abstract

The inscription of the Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy as a UNESCO World Heritage Site in 2012 significantly reshaped the perception and management of Subak in Bali, including Subak Sembung in Denpasar City. Amid increasing urbanization, land conversion, and tourism development, Subak Sembung has faced the challenge of maintaining its agricultural function while adapting to social, economic, and environmental changes. This study aims to examine the transformation of Subak Sembung from 2012 to 2024, focusing on institutional adaptation, ecotourism development, and spatial negotiation in sustaining an urban cultural landscape. The research employs the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through oral history interviews with Subak leaders and members, field observations, documentation, and a review

of written sources. These materials were analyzed chronologically to explain the interplay between continuity and change in the management of Subak. The findings reveal that the transformation of Subak Sembung does not represent a shift from agriculture to tourism; rather, it reflects a process of institutional adaptation that enables agricultural, economic, social, cultural, and ecological functions to coexist. Ecotourism development, technological innovation, the implementation of awig-awig (customary regulations), and government support have collectively contributed to sustaining Subak amid the rapid urban development of Denpasar. This study contributes to the historiography of Subak by demonstrating that the sustainability of traditional institutions is determined primarily by the capacity of local communities to negotiate competing development interests rather than by international recognition alone.

Keywords: Subak Sembung, Transformation, Social History, Ecotourism, UNESCO.

PENDAHULUAN

Perkembangan wilayah perkotaan di Bali dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang signifikan terhadap keberadaan lahan pertanian, khususnya sistem Subak sebagai institusi tradisional yang mengatur pengelolaan irigasi sekaligus menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, dan religius masyarakat Bali. Pertumbuhan penduduk, ekspansi kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, serta perkembangan industri pariwisata telah meningkatkan tekanan terhadap keberlanjutan lahan sawah, terutama pada wilayah perkotaan seperti Kota Denpasar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kawasan Subak mengalami penyusutan luas lahan, perubahan fungsi ruang, bahkan kehilangan fungsi agrarisnya akibat alih fungsi lahan yang terus berlangsung. Dalam konteks tersebut, keberadaan Subak tidak lagi hanya menghadapi persoalan teknis pertanian, tetapi juga berhadapan dengan dinamika ekonomi, kebijakan pembangunan, dan perubahan sosial masyarakat (Cole & Browne, 2015).

Posisi Subak mengalami perubahan penting sejak Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2012. Pengakuan tersebut menempatkan Subak bukan hanya sebagai sistem irigasi tradisional, melainkan sebagai lanskap budaya yang memiliki nilai universal luar biasa karena merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana. Pengakuan internasional ini sekaligus memperluas cara pandang terhadap Subak, dari institusi agraris menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan serta memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata berbasis budaya. Di sisi lain, pengakuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya kepentingan ekonomi, komersialisasi ruang, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pelestarian dengan tuntutan pembangunan (UNESCO, 2012).

Perubahan tersebut tampak nyata pada Subak Sembung yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Berbeda dengan sebagian besar Subak yang berada di kawasan pedesaan, Subak Sembung berkembang di tengah kawasan perkotaan yang mengalami pertumbuhan fisik cukup pesat. Posisi tersebut menjadikan Subak Sembung menghadapi tekanan urbanisasi yang lebih kompleks dibandingkan Subak di wilayah rural. Dalam kondisi demikian, masyarakat Subak tidak hanya dituntut mempertahankan fungsi pertanian, tetapi juga melakukan berbagai bentuk adaptasi agar keberadaan Subak tetap memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Salah satu strategi yang berkembang adalah pengembangan kawasan ekowisata yang memadukan aktivitas pertanian dengan fungsi rekreasi, edukasi, dan konservasi lingkungan (Putri et al., 2020).

Untuk memahami dinamika perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep negosiasi ruang sebagai pisau analisis dalam menjelaskan proses transformasi Subak

Sembung. Konsep ini berpijak pada pandangan Henri Lefebvre yang menyatakan bahwa ruang bukan sekadar wadah fisik tempat berlangsungnya aktivitas manusia, melainkan merupakan hasil produksi sosial yang dibentuk melalui interaksi berbagai aktor, kepentingan, relasi kekuasaan, dan praktik keseharian. Dengan demikian, perubahan fungsi suatu ruang tidak hanya dipengaruhi oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus (Lefebvre, 1991).

Dalam konteks Subak Sembung, ruang pertanian tidak dipahami sebagai ruang yang bersifat tetap, melainkan sebagai ruang yang terus mengalami proses negosiasi antara berbagai kepentingan, seperti pelestarian budaya, produktivitas pertanian, pengembangan ekowisata, perlindungan lingkungan, serta pembangunan perkotaan. Negosiasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, kelembagaan Subak, masyarakat lokal, pengelola ekowisata, hingga masyarakat pengguna kawasan. Oleh karena itu, transformasi Subak Sembung dipahami bukan sebagai perubahan yang menghilangkan identitas agraris, tetapi sebagai proses adaptasi kelembagaan dalam mempertahankan keberlanjutan kawasan di tengah dinamika urbanisasi (Lefebvre, 1991).

Melalui konsep tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi di Subak Sembung merupakan hasil interaksi antara kontinuitas dan perubahan (*continuity and change*). Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya berfokus pada perubahan fisik kawasan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat lokal membangun strategi adaptasi, mempertahankan nilai-nilai Tri Hita Karana, serta menegosiasikan berbagai kepentingan yang berkembang setelah penetapan UNESCO pada tahun 2012 (Vickers, 2012).

Pengembangan ekowisata di Subak Sembung memperlihatkan bahwa perubahan yang terjadi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pergeseran fungsi lahan dari ruang produksi menuju ruang wisata. Perubahan tersebut merupakan proses historis yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari krama Subak, pekaseh, pengelola ekowisata, pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar dalam merespons berbagai tantangan yang muncul setelah penetapan UNESCO. Dalam proses tersebut berlangsung berbagai bentuk adaptasi, negosiasi, dan kompromi terhadap penggunaan ruang agar fungsi pertanian tetap dapat dipertahankan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, transformasi Subak Sembung tidak hanya mencerminkan perubahan fisik kawasan, tetapi juga menunjukkan perubahan cara masyarakat memaknai ruang agraris sebagai ruang produksi, ruang budaya, ruang ekologis, sekaligus ruang ekonomi (Togatorop et al., 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas Subak dari berbagai perspektif. Putri, Suryawardani, dan Diarta (2020) menjelaskan strategi pengembangan Subak Sembung sebagai daya tarik wisata perkotaan melalui pendekatan agribisnis dan kepariwisataan. Wiguna, Sudarta, dan Diarta (2018) menitikberatkan pembahasan pada diversifikasi fungsi Subak sebagai kawasan ekowisata, sedangkan Togatorop, Wijayanti, dan Anggreini (2022) mengkaji aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan ekowisata Subak Sembung. Kajian lain juga membahas implementasi Tri Hita Karana dalam pelestarian Subak, pengembangan pariwisata berkelanjutan, maupun strategi pengendalian alih fungsi lahan. Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai pengelolaan Subak, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menggunakan perspektif agribisnis, pariwisata, hukum, atau pembangunan berkelanjutan (Togatorop et al., 2022).

Di sisi lain, kajian yang menempatkan transformasi Subak Sembung sebagai proses sejarah masih relatif terbatas. Perubahan yang berlangsung setelah penetapan UNESCO belum banyak dianalisis melalui perspektif sejarah sosial yang menekankan proses

perubahan, kesinambungan (continuity), dan adaptasi kelembagaan masyarakat dalam menghadapi dinamika urbanisasi. Padahal, perubahan tersebut tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, praktik sosial masyarakat, serta kemampuan kelembagaan Subak dalam melakukan negosiasi terhadap berbagai tekanan pembangunan. Dengan demikian, pembahasan mengenai transformasi Subak Sembung memerlukan pendekatan historis yang tidak hanya menjelaskan apa yang berubah, tetapi juga bagaimana perubahan tersebut berlangsung, siapa aktor yang berperan, serta mengapa perubahan tersebut dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu (Lansing, 2007).

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis transformasi Subak Sembung pada periode 2012–2024 sebagai respons terhadap perubahan yang muncul setelah penetapan Warisan Dunia UNESCO. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu perubahan fungsi Subak dalam menjaga keberlanjutan kawasan setelah pengakuan UNESCO, transformasi praktik pengelolaan dan kehidupan sosial masyarakat Subak, serta implikasi perubahan tersebut terhadap keberlanjutan Subak sebagai lanskap budaya perkotaan. Melalui pendekatan sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa keberlanjutan Subak Sembung bukan semata-mata ditentukan oleh perlindungan formal sebagai warisan budaya, melainkan oleh kemampuan masyarakat lokal dalam menegosiasikan berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di tengah dinamika perkembangan Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk merekonstruksi proses transformasi Subak Sembung di Kelurahan Peguyangan, Kota Denpasar, dalam kurun waktu 2012–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada penetapan Lanskap Budaya Provinsi Bali sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2012 yang menjadi titik penting perubahan posisi Subak, dari sistem pertanian tradisional menjadi bagian dari warisan budaya dunia yang sekaligus berkembang sebagai kawasan ekowisata. Rentang waktu tersebut juga memungkinkan penelusuran dinamika perubahan yang terjadi hingga fase pemulihan pascapandemi COVID-19 pada tahun 2024.

Penelitian dilaksanakan melalui tahapan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber primer diperoleh melalui wawancara sejarah lisan (oral history) dengan Pekaseh Subak Sembung, Ketua Ekowisata Subak Sembung, Sekretaris Subak Sembung, petani, pedagang, dan pengunjung kawasan Subak Sembung. Wawancara tersebut digunakan untuk merekam pengalaman, persepsi, dan ingatan para pelaku mengenai perubahan yang terjadi sejak penetapan UNESCO hingga perkembangan ekowisata pada periode penelitian. Selain wawancara, sumber primer juga diperoleh melalui observasi lapangan terhadap kondisi fisik kawasan, aktivitas pertanian, fasilitas ekowisata, serta dokumentasi visual yang menggambarkan perubahan lanskap Subak Sembung. Penelitian ini turut memanfaatkan dokumen resmi seperti awig-awig Subak, kebijakan pemerintah mengenai perlindungan lahan pertanian, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan Subak Sembung.

Sumber sekunder diperoleh melalui telaah berbagai buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, publikasi UNESCO, regulasi pemerintah, serta pemberitaan media yang membahas perkembangan Subak, pelestarian warisan budaya, ekowisata, dan perubahan tata ruang di Bali. Penelusuran sumber sekunder dilakukan untuk memperoleh

konteks historis sekaligus membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan sebelumnya.

Seluruh sumber yang telah dikumpulkan selanjutnya melalui proses kritik sumber untuk menguji keabsahan dan kredibilitas data. Kritik eksternal dilakukan dengan menelaah autentisitas dokumen, identitas penulis, waktu penerbitan, serta asal-usul sumber yang digunakan. Sementara itu, kritik internal dilakukan dengan menilai isi informasi melalui perbandingan antara hasil wawancara, dokumen resmi, literatur ilmiah, dan hasil observasi lapangan. Proses triangulasi dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bias narasumber sekaligus meningkatkan validitas interpretasi terhadap peristiwa yang diteliti.

Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu menganalisis fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi untuk menjelaskan proses transformasi Subak Sembung secara kronologis. Analisis tidak hanya diarahkan pada identifikasi perubahan fungsi kawasan, tetapi juga pada hubungan sebab akibat yang melatarbelakangi perubahan tersebut, aktor-aktor yang terlibat, serta dinamika adaptasi masyarakat Subak dalam menghadapi urbanisasi, perkembangan pariwisata, dan kebijakan pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, perubahan yang terjadi dipahami sebagai proses historis yang memperlihatkan kesinambungan (*continuity*) sekaligus perubahan (*change*) dalam pengelolaan Subak sebagai institusi sosial, budaya, dan agraris.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis berdasarkan fakta-fakta yang telah diverifikasi. Narasi disusun secara kronologis untuk memperlihatkan perkembangan transformasi Subak Sembung sejak penetapan UNESCO pada tahun 2012 hingga tahun 2024. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan yang terjadi, tetapi juga menjelaskan bagaimana masyarakat Subak Sembung membangun berbagai strategi adaptasi dan negosiasi dalam mempertahankan keberlanjutan kawasan di tengah tekanan urbanisasi dan perkembangan pariwisata di Kota Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan UNESCO Dan Awal Transformasi Subak Sembung (2012–2014)

Penetapan Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2012 menjadi titik balik penting dalam sejarah perkembangan Subak di Bali (UNESCO, 2012). Sebelum memperoleh pengakuan tersebut, Subak umumnya dipahami sebagai sistem irigasi tradisional yang berfungsi mengatur distribusi air untuk kepentingan pertanian. Meskipun memiliki dimensi sosial, religius, dan ekologis, perhatian terhadap Subak lebih banyak diarahkan pada fungsinya sebagai institusi agraris. Setelah pengakuan UNESCO, makna Subak mengalami perluasan. Subak tidak lagi diposisikan semata sebagai organisasi pengairan, tetapi sebagai lanskap budaya yang merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana. Perubahan status tersebut tidak hanya meningkatkan pengakuan internasional terhadap Subak, tetapi juga memengaruhi arah kebijakan pelestarian dan pengelolaannya di tingkat lokal.

Perubahan cara pandang tersebut turut memengaruhi kawasan-kawasan Subak yang berada di wilayah perkotaan, termasuk Subak Sembung di Kelurahan Peguyangan, Kota Denpasar. Berbeda dengan Subak yang berada di kawasan pedesaan, Subak Sembung menghadapi tekanan urbanisasi yang relatif tinggi akibat berkembangnya kawasan permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi perkotaan. Dalam kondisi tersebut, penetapan UNESCO menjadi momentum yang memperkuat posisi Subak sebagai ruang yang tidak hanya memiliki fungsi produksi pertanian, tetapi juga memiliki nilai historis, ekologis, dan budaya yang perlu dipertahankan. Dengan demikian, pengakuan internasional

tersebut memberikan legitimasi baru bagi berbagai upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah (Wijayanti et al., 2020).

Namun demikian, pengakuan UNESCO tidak secara otomatis menghentikan ancaman terhadap keberadaan Subak. Sebaliknya, perubahan status tersebut justru menghadirkan dinamika baru. Meningkatnya perhatian terhadap Subak membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis pariwisata, tetapi pada saat yang sama memperbesar potensi komersialisasi ruang. Dalam konteks ini, masyarakat Subak Sembung dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pelestarian dengan tuntutan pembangunan wilayah perkotaan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa status Warisan Dunia bukanlah titik akhir pelestarian, melainkan awal dari proses negosiasi baru mengenai pemanfaatan ruang agraris di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung di Kota Denpasar (Picard, 1996).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat Subak Sembung terhadap perubahan tersebut tidak bersifat pasif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Subak Sembung, para petani tetap mempertahankan lahan pertanian meskipun aktivitas pertanian tidak selalu memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi. Keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif sejarah sosial, sikap tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pelestarian, tetapi juga bertindak sebagai aktor yang secara aktif mempertahankan keberlangsungan institusi Subak melalui praktik-praktik keseharian yang mereka lakukan.

Perubahan makna Subak pascapenetapan UNESCO juga terlihat dari berkembangnya fungsi kawasan sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Sebelum tahun 2012, aktivitas di Subak Sembung didominasi oleh kegiatan pertanian yang berkaitan dengan pengolahan lahan, distribusi air, serta pelaksanaan ritual keagamaan yang berhubungan dengan siklus tanam. Setelah memperoleh pengakuan sebagai bagian dari lanskap budaya dunia, kawasan ini mulai dipandang sebagai ruang yang memiliki nilai edukatif, rekreatif, dan ekologis. Perubahan tersebut menjadi dasar bagi pengembangan konsep ekowisata yang kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, transformasi fungsi Subak tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan diawali oleh perubahan cara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan memaknai keberadaan Subak sebagai warisan budaya (Putri et al., 2020).

Perubahan tersebut sejalan dengan pandangan Picard (1995) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap warisan budaya sering kali diikuti oleh proses pembentukan nilai ekonomi baru melalui aktivitas pariwisata. Dalam kasus Subak Sembung, pengakuan UNESCO memperkuat identitas budaya kawasan sekaligus membuka peluang pemanfaatan ruang untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan tersebut tidak diarahkan untuk menggantikan fungsi pertanian, melainkan sebagai strategi mempertahankan keberadaan lahan sawah di tengah meningkatnya tekanan urbanisasi. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang berkembang melalui ekowisata diposisikan sebagai instrumen pendukung bagi keberlanjutan Subak, bukan sebagai tujuan utama pengelolaan kawasan.

Perubahan orientasi tersebut juga memperoleh dukungan dari berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Kehadiran regulasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memperkuat posisi hukum kawasan Subak sebagai ruang yang harus dipertahankan dari ancaman alih fungsi lahan. Meskipun demikian, perlindungan formal tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat lokal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan mempertahankan

Subak Sembung lebih banyak ditentukan oleh sinergi antara regulasi pemerintah dengan kelembagaan lokal yang telah lama berkembang melalui sistem Subak, termasuk keberadaan awig-awig sebagai aturan adat yang mengatur pemanfaatan lahan dan hubungan antarkrama.

Dari perspektif historiografi, periode 2012–2014 dapat dipahami sebagai fase awal transformasi Subak Sembung. Pada fase ini belum terjadi perubahan fisik kawasan secara signifikan, tetapi telah berlangsung perubahan konseptual mengenai fungsi dan posisi Subak dalam kehidupan masyarakat. Jika sebelumnya Subak dipahami terutama sebagai institusi agraris, maka setelah penetapan UNESCO muncul pemaknaan baru yang menempatkan Subak sebagai warisan budaya, ruang ekologis, sekaligus aset pembangunan daerah. Pergeseran cara pandang tersebut menjadi fondasi bagi berbagai perubahan yang berlangsung pada periode berikutnya, termasuk pengembangan ekowisata, inovasi pengelolaan kawasan, serta munculnya berbagai bentuk negosiasi ruang antara kepentingan konservasi dan pembangunan (Lansing, 2007).

Dengan demikian, transformasi awal Subak Sembung tidak dapat dijelaskan hanya melalui perubahan kebijakan setelah penetapan UNESCO. Perubahan tersebut merupakan hasil interaksi antara pengakuan internasional, respons masyarakat lokal, kebijakan pemerintah, dan tekanan urbanisasi yang secara bersama-sama membentuk arah perkembangan Subak pada periode selanjutnya. Oleh karena itu, penetapan UNESCO bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan momentum historis yang mengubah cara masyarakat memaknai, mengelola, dan mempertahankan Subak sebagai lanskap budaya di tengah dinamika perkembangan Kota Denpasar.

Transformasi Pengelolaan Subak Sembung: Adaptasi Terhadap Urbanisasi, Teknologi, Dan Ekowisata

Perubahan yang berlangsung di Subak Sembung setelah penetapan UNESCO tidak hanya terlihat pada meningkatnya pengakuan terhadap nilai budaya Subak, tetapi juga pada perubahan praktik pengelolaannya (UNESCO, 2012). Jika periode awal pascapenetapan UNESCO ditandai oleh perubahan cara pandang terhadap Subak sebagai warisan budaya, maka periode berikutnya menunjukkan bagaimana masyarakat mulai menerjemahkan pengakuan tersebut ke dalam berbagai strategi adaptasi yang memungkinkan Subak tetap bertahan di tengah tekanan urbanisasi Kota Denpasar. Dengan demikian, transformasi yang terjadi tidak sekadar berupa perubahan fungsi kawasan, melainkan juga perubahan dalam cara masyarakat mengelola ruang agraris agar mampu menjawab tuntutan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bersamaan.

Urbanisasi menjadi faktor utama yang mendorong perubahan tersebut (Wijayanti et al., 2020).. Sebagai Subak yang berada di wilayah perkotaan, Subak Sembung menghadapi tekanan yang berbeda dibandingkan Subak di kawasan pedesaan. Pertumbuhan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya kebutuhan ruang menyebabkan lahan pertanian berada dalam posisi yang semakin rentan terhadap alih fungsi. Kondisi tersebut mendorong masyarakat Subak untuk mengembangkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lahan, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi kawasan agar keberadaan sawah tetap memiliki nilai bagi masyarakat lokal.

Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah pengembangan kawasan ekowisata. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ekowisata tidak dilakukan dengan mengubah fungsi utama lahan pertanian menjadi kawasan wisata.

Gambar 1. Area masuk kawasan ekowisata Subak Sembung



(Sumber: Dokumentasi Arifin, 2026)

Melainkan memanfaatkan potensi lanskap persawahan sebagai ruang edukasi, rekreasi, dan konservasi tanpa menghilangkan aktivitas pertanian yang telah berlangsung sebelumnya.

Gambar 2. Rumah Gilang Gabah Uma Palak di Subak Sembung



(Sumber: Dokumentasi Perdi, 2026)

Strategi ini menunjukkan bahwa masyarakat Subak Sembung memilih pendekatan adaptif dibandingkan pendekatan konservatif. Sawah tidak dipertahankan sebagai ruang yang tertutup dari aktivitas baru, tetapi dibuka secara terbatas agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi tambahan yang dapat mendukung keberlanjutan sistem Subak (Putri et al., 2020).

Hasil wawancara dengan Ketua Ekowisata Subak Sembung memperlihatkan bahwa pengembangan kawasan tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah munculnya rencana pembangunan infrastruktur berupa jembatan yang berpotensi mengubah tata ruang kawasan Subak. Persoalan tersebut kemudian diselesaikan melalui proses mediasi yang melibatkan pengelola Subak, pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, serta instansi terkait. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberlanjutan Subak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi formal, tetapi juga pada kemampuan masyarakat membangun komunikasi dan negosiasi dengan berbagai aktor pembangunan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perubahan ruang di Subak Sembung tidak berlangsung secara sepihak, melainkan merupakan hasil proses negosiasi antara kepentingan pembangunan perkotaan dengan upaya masyarakat mempertahankan fungsi agraris kawasan. Dalam pengertian ini, ruang menjadi arena relasi sosial yang terus diproduksi dan dinegosiasikan oleh berbagai aktor. Dalam perspektif sejarah sosial, proses tersebut memperlihatkan bahwa ruang agraris merupakan arena interaksi berbagai kepentingan yang terus mengalami perundingan seiring berkembangnya kota.

Transformasi pengelolaan juga terlihat melalui pemanfaatan teknologi dalam aktivitas pertanian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Subak mulai mengadopsi berbagai inovasi yang mendukung efisiensi kerja tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan Subak. Bantuan kincir air dan panel surya yang diberikan pada tahun 2023 dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional kawasan, termasuk penyediaan energi bagi fasilitas umum dan aktivitas pertanian. Kehadiran teknologi tersebut tidak menggantikan sistem pengelolaan tradisional, melainkan menjadi pelengkap yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan dan meningkatnya kebutuhan pengelolaan kawasan (Rusmana, 2025).

Menariknya, proses modernisasi tersebut tidak menghilangkan mekanisme tradisional yang selama ini menjadi fondasi kelembagaan Subak (Lansing, 2007). Sistem pembagian air tetap dijalankan melalui mekanisme yang mengedepankan asas keadilan antaranggota Subak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi air dilakukan secara terencana sehingga setiap petani memperoleh hak sesuai kebutuhan lahannya. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak mengubah prinsip dasar pengelolaan Subak, tetapi justru memperkuat kemampuan kelembagaan lokal dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air.

Di samping perubahan dalam aspek teknis, transformasi juga berlangsung pada kehidupan sosial masyarakat (Togatorop et al., 2022). Berkembangnya aktivitas ekowisata memperluas sumber pendapatan masyarakat yang sebelumnya hampir sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian. Kehadiran pengunjung membuka peluang ekonomi baru melalui aktivitas perdagangan, jasa, maupun penyediaan fasilitas pendukung wisata. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang aktivitas tersebut sebagai pengganti pertanian, melainkan sebagai sumber pendapatan tambahan yang membantu mempertahankan keberadaan lahan sawah. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi baru berkembang di atas fondasi agraris yang telah ada, bukan menggantikannya.

Perubahan tersebut turut memengaruhi cara masyarakat memaknai ruang Subak. Kehadiran jogging track, ruang terbuka hijau, dan berbagai fasilitas pendukung menyebabkan kawasan Subak tidak lagi hanya digunakan oleh petani, tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan sebagai ruang rekreasi dan olahraga.

Gambar 3. Jalur pejalan kaki (jogging track) di sepanjang saluran irigasi Subak Sembung yang dimanfaatkan sebagai ruang publik



(Sumber: Dokumentasi Daffa, 2026)

Fenomena ini menunjukkan terjadinya perluasan fungsi ruang agraris menjadi ruang publik. Akan tetapi, hasil observasi memperlihatkan bahwa fungsi baru tersebut tetap dijalankan tanpa menghilangkan aktivitas pertanian sebagai identitas utama kawasan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Subak berhasil membangun keseimbangan antara fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam satu ruang yang sama (Wiguna et al., 2018).

Keberhasilan mempertahankan keseimbangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran kelembagaan lokal. Salah satu instrumen yang memiliki posisi penting adalah awig-awig yang mengatur pemanfaatan lahan di kawasan Subak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Ekowisata Subak Sembung, masyarakat menerapkan pembatasan terhadap alih fungsi lahan sehingga tanah yang berada di kawasan Subak tidak dapat dengan mudah diubah menjadi kawasan permukiman atau bangunan komersial. Meskipun terdapat ruang toleransi bagi kebutuhan tertentu pemilik lahan, penerapan awig-awig menunjukkan bahwa masyarakat tetap menempatkan kepentingan pelestarian kawasan sebagai prioritas utama. Dalam konteks sejarah kelembagaan, kondisi ini memperlihatkan kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dengan tantangan modern tanpa kehilangan fungsi sosialnya sebagai mekanisme pengendalian masyarakat.

Transformasi yang berlangsung di Subak Sembung juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai Tri Hita Karana tidak mengalami stagnasi, melainkan terus mengalami reinterpretasi

sesuai dengan kebutuhan zaman (Windia et al., 2018). Hubungan harmonis antara manusia, alam, dan aspek spiritual tetap dipertahankan, tetapi diwujudkan melalui bentuk-bentuk pengelolaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan perkotaan. Gotong royong dalam pemeliharaan saluran irigasi, pelaksanaan ritual di lingkungan Subak, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berakhir pada melemahnya nilai-nilai tradisional. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut justru menjadi modal sosial yang memungkinkan masyarakat mempertahankan keberadaan Subak di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat.

Dengan demikian, transformasi pengelolaan Subak Sembung tidak dapat dipahami sebagai proses pergeseran dari pertanian menuju pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi adalah proses adaptasi kelembagaan yang memungkinkan berbagai fungsi baru berkembang tanpa menghilangkan identitas agraris kawasan. Urbanisasi, inovasi teknologi, berkembangnya ekowisata, dan penguatan kelembagaan adat merupakan bagian dari proses sejarah yang saling berkaitan dalam membentuk wajah baru Subak Sembung sebagai lanskap budaya perkotaan. Proses tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa keberlanjutan Subak ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola perubahan, bukan dengan menolak perubahan itu sendiri.

Negosiasi Ruang, Keberlanjutan Subak, Dan Masa Depan Ekowisata

Transformasi yang berlangsung di Subak Sembung memperlihatkan bahwa keberlanjutan suatu institusi tradisional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan bentuk-bentuk lama, tetapi juga oleh kapasitasnya untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Subak Sembung, perubahan yang terjadi sejak penetapan UNESCO pada tahun 2012 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa pelestarian tidak berlangsung melalui upaya mempertahankan kondisi secara statis, melainkan melalui proses negosiasi yang terus-menerus antara berbagai kepentingan yang berkembang di kawasan perkotaan (UNESCO, 2012).

Perkembangan Kota Denpasar membawa konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan ruang untuk permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, keberadaan Subak sebagai kawasan pertanian justru semakin penting karena berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, daerah resapan air, sekaligus bagian dari identitas budaya Bali. Situasi tersebut menempatkan Subak Sembung pada posisi yang tidak sederhana. Kawasan ini harus mampu memenuhi tuntutan pembangunan tanpa kehilangan fungsi ekologis maupun nilai budaya yang telah melekat selama berabad-abad. Oleh karena itu, sejarah perkembangan Subak Sembung pada periode penelitian dapat dipahami sebagai sejarah mengenai negosiasi ruang, yaitu proses ketika berbagai aktor berusaha mempertahankan, memanfaatkan, sekaligus mendefinisikan kembali fungsi ruang agraris di tengah dinamika kota yang terus berkembang (Lefebvre, 1991).

Dalam perspektif Lefebvre (1991), ruang tidak dipahami sebagai entitas yang bersifat tetap, tetapi sebagai hasil relasi sosial yang terus diproduksi melalui interaksi berbagai aktor dan kepentingan. Dengan demikian, perubahan yang terjadi di Subak Sembung merefleksikan proses produksi ruang yang berlangsung secara dinamis di tengah perkembangan kawasan perkotaan.

Negosiasi tersebut berlangsung melalui interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Pemerintah daerah berupaya mendorong pembangunan sekaligus melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Masyarakat Subak berusaha mempertahankan sawah sebagai sumber kehidupan sekaligus warisan budaya. Pengelola ekowisata melihat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis lingkungan, sementara masyarakat perkotaan mulai memanfaatkan kawasan Subak sebagai ruang rekreasi dan aktivitas olahraga. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan Subak Sembung bukan merupakan hasil dominasi salah satu aktor, melainkan hasil kompromi yang terus dibangun melalui komunikasi, musyawarah, dan mekanisme kelembagaan yang berkembang di lingkungan Subak.

Salah satu bentuk negosiasi tersebut terlihat dalam upaya mencegah alih fungsi lahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Ekowisata Subak Sembung, terdapat beberapa upaya pembangunan yang berpotensi mengubah fungsi kawasan, termasuk rencana pembangunan infrastruktur yang dinilai dapat mengganggu keberadaan lahan pertanian. Persoalan tersebut diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan pengurus Subak, pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, serta instansi terkait. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pelestarian Subak tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kemampuan masyarakat membangun jaringan kelembagaan yang mampu memperjuangkan kepentingan kawasan. Dengan demikian, proses pelestarian merupakan praktik sosial yang berlangsung secara aktif, bukan sekadar pelaksanaan kebijakan dari pemerintah.

Dalam proses tersebut, awig-awig tetap memiliki posisi penting sebagai mekanisme pengendalian sosial. Aturan adat tidak hanya mengatur hubungan antaranggota Subak dalam kegiatan pertanian, tetapi juga menjadi instrumen yang mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak mudah dialihfungsikan. Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan awig-awig tidak dilakukan secara kaku. Terdapat ruang kompromi terhadap kebutuhan tertentu masyarakat lokal, namun prinsip utama mengenai perlindungan lahan tetap dipertahankan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai penjaga keberlanjutan kelembagaan Subak (Lansing, 2007).

Transformasi tersebut juga memperlihatkan perubahan cara masyarakat memaknai hubungan antara pertanian dan pariwisata. Sebelum berkembangnya ekowisata, kedua sektor tersebut sering diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Perkembangan penelitian ini justru menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Ekowisata dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperkuat keberlanjutan pertanian melalui penciptaan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Pendapatan dari aktivitas wisata memberikan insentif ekonomi bagi petani untuk tetap mempertahankan lahan sawah sehingga tekanan untuk menjual lahan kepada pengembang dapat dikurangi. Dengan demikian, hubungan antara pertanian dan pariwisata di Subak Sembung tidak bersifat substitutif, melainkan komplementer (Putri et al., 2020).

Meskipun demikian, pengembangan ekowisata juga menghadirkan tantangan baru. Meningkatnya jumlah pengunjung berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, seperti meningkatnya volume sampah, perubahan pola pemanfaatan ruang, serta kemungkinan bergesernya orientasi pengelolaan kawasan dari kepentingan agraris menuju kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, keberlanjutan Subak Sembung sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara fungsi produksi pertanian, konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut hingga kini masih dapat dipertahankan karena masyarakat tetap menempatkan aktivitas pertanian sebagai identitas utama kawasan (Sitohang & Purnomo, 2023).

Dari perspektif sejarah sosial, perubahan yang terjadi di Subak Sembung menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus perubahan (*continuity and change*). Kesinambungan terlihat pada tetap dipertahankannya nilai-nilai Tri Hita Karana, keberadaan awig-awig, sistem organisasi Subak, serta pelaksanaan berbagai aktivitas ritual yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sebaliknya, perubahan tampak pada berkembangnya fungsi ruang, penggunaan teknologi pertanian, keterlibatan berbagai

lembaga di luar komunitas Subak, serta munculnya aktivitas ekonomi baru melalui ekowisata. Dengan demikian, transformasi yang terjadi tidak menghilangkan identitas Subak sebagai institusi tradisional, melainkan menunjukkan kemampuan kelembagaan tersebut untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman (Vickers, 2012).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pengakuan UNESCO tidak dapat dipahami sebagai faktor tunggal yang menjamin keberlanjutan Subak. Pengakuan tersebut memang memberikan legitimasi internasional dan memperkuat perhatian pemerintah terhadap pelestarian Subak, tetapi keberhasilan mempertahankan kawasan tetap bergantung pada tindakan masyarakat lokal. Dalam kasus Subak Sembung, keberadaan petani, pekaseh, pengurus ekowisata, serta dukungan pemerintah daerah menjadi faktor yang saling melengkapi dalam membangun sistem pengelolaan yang adaptif. Dengan kata lain, pelestarian Subak merupakan hasil interaksi antara kebijakan formal dan praktik-praktik lokal yang berkembang di tingkat komunitas.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, transformasi Subak Sembung memberikan gambaran mengenai perubahan karakter Subak di wilayah perkotaan pada abad ke-21. Subak tidak lagi hanya dipahami sebagai sistem pengairan tradisional, tetapi berkembang menjadi ruang yang memadukan fungsi agraris, ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi secara bersamaan. Proses tersebut menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu identik dengan hilangnya institusi tradisional. Sebaliknya, sejarah Subak Sembung memperlihatkan bahwa institusi lokal mampu mempertahankan keberadaannya melalui berbagai bentuk adaptasi dan negosiasi tanpa melepaskan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi pembentukannya. Dalam konteks inilah, transformasi Subak Sembung memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai sejarah pelestarian warisan budaya di Bali, khususnya mengenai bagaimana komunitas lokal membangun strategi keberlanjutan di tengah dinamika urbanisasi dan perkembangan pariwisata kontemporer.

KESIMPULAN

Transformasi Subak Sembung pada periode 2012–2024 menunjukkan bahwa pengakuan Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy sebagai Warisan Dunia UNESCO menjadi titik balik penting dalam perkembangan Subak di kawasan perkotaan. Pengakuan tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi Subak sebagai warisan budaya dunia, tetapi juga mendorong perubahan cara masyarakat dan pemerintah memandang Subak sebagai ruang yang memiliki fungsi agraris, ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi secara bersamaan. Dalam konteks Subak Sembung, perubahan tersebut berlangsung melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan pelestarian, tekanan urbanisasi, perkembangan pariwisata, serta kemampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan kelembagaan Subak.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa transformasi Subak Sembung bukan merupakan pergeseran dari pertanian menuju pariwisata, melainkan proses adaptasi kelembagaan yang memungkinkan fungsi-fungsi baru berkembang tanpa menghilangkan identitas agraris kawasan. Pengembangan ekowisata, pemanfaatan teknologi, penyediaan ruang publik, serta penguatan perlindungan lahan melalui regulasi dan awig-awig menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak perubahan, tetapi mengelolanya agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Subak dan filosofi Tri Hita Karana. Dengan demikian, keberlanjutan Subak Sembung lebih ditentukan oleh kapasitas komunitas lokal dalam mengelola perubahan daripada oleh pengakuan internasional atau perlindungan hukum semata.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlangsungan Subak di wilayah perkotaan

merupakan hasil negosiasi ruang yang terus berlangsung antara berbagai aktor, yaitu masyarakat Subak, pemerintah daerah, pengelola ekowisata, dan masyarakat pengguna kawasan. Negosiasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan lahan, tetapi juga menyangkut upaya mempertahankan keseimbangan antara kepentingan konservasi, produktivitas pertanian, pembangunan kota, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif sejarah sosial, proses tersebut memperlihatkan bahwa perubahan institusi tradisional tidak selalu berujung pada kemunduran, melainkan dapat menjadi bentuk adaptasi yang memperkuat daya tahan kelembagaan dalam menghadapi dinamika zaman.

Secara historiografis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah Subak dengan menempatkan transformasi Subak Sembung sebagai proses sejarah yang memperlihatkan hubungan antara kontinuitas (*continuity*) dan perubahan (*change*) dalam pengelolaan lanskap budaya perkotaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas Subak dari perspektif agribisnis, pariwisata, atau pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Subak merupakan hasil interaksi antara kebijakan, masyarakat, nilai budaya, dan dinamika ruang kota yang berlangsung secara historis. Dengan demikian, sejarah Subak tidak hanya dapat dipahami sebagai sejarah sistem irigasi tradisional, tetapi juga sebagai sejarah adaptasi komunitas lokal dalam mempertahankan identitas budaya di tengah proses urbanisasi.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bahwa pelestarian Subak di kawasan perkotaan perlu menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam setiap kebijakan pengelolaan kawasan. Pengembangan ekowisata dan berbagai bentuk inovasi sebaiknya tetap berorientasi pada penguatan fungsi agraris, perlindungan lahan pertanian, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi fondasi keberadaan Subak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian melalui perbandingan dengan Subak perkotaan lainnya di Bali sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika transformasi lanskap budaya dalam menghadapi perkembangan kota pada masa kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Cole, S., & Browne, M. (2015). Tourism and water inequity in Bali: A social-ecological systems analysis. *Human Ecology*, 43(2), 439–450. <https://doi.org/10.1007/s10745-015-9739-z>
- Geertz, C. (1980). *Negara: The theatre state in nineteenth-century Bali*. Princeton University Press.
- Ginting, S. S. Br., Ginting, B., Sitorus, H., Badaruddin, & Sudarwati, L. (2023). Dinamika perubahan sosial dan pola adaptasi masyarakat Sukamakmur pasca peralihan lahan pertanian menjadi penunjang pariwisata. *SOSTECH: Jurnal Sosial dan Teknologi*, 3(6), 494–503.
- Ikhsan, L., Windia, I W., & Astiti, N. W. S. (2019). Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Subak Kerdung, Kelurahan Pedungan. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 8(2), 205–213.
- Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010.
- Kardana, P. P. I. W., Lestari, P. F. K., & Pratiwi, L. P. K. (2022). Peran Subak dalam optimalisasi pengembangan agrowisata Subak Kualon di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Sutasoma*, 1(1), 120–132. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v1i2.194>
- Lansing, J. S. (2007). *Priests and programmers: Technologies of power in the engineered landscape of Bali*. Princeton University Press.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Blackwell.
- Martha, D. A. G. M., Mahaputra, I. B. G. A., & Putra, I. M. A. M. (2024). Konsep ekowisata sebagai role model pengembangan kawasan daya tarik wisata (DTW) pada pengelolaan Subak perkotaan Denpasar dalam perspektif hukum kepariwisataan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1284–1291.
- Picard, M. (1996). *Bali: Cultural tourism and touristic culture*. Archipelago Press.
- Putri, N. L. M. A. Y., Suryawardani, I. G. A. O., & Diarta, I. K. S. (2020). Strategi perekrutan Subak Sembung sebagai daya tarik wisata di perkotaan. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*,

- 9(1), 29–38.
- Rahayu, K. A., Tika, W., & Gunadnya, I. B. P. (2023). Analisis rasio prestasi manajemen (RPM) distribusi air irigasi pada Subak di DAS Ho. *Jurnal BETA*, 11, 419–426.
- Rusmana, I. P. E. (2025). Pengembangan kapasitas Subak dalam menghadapi tantangan pertanian modern dan perubahan iklim di Bali. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 6(2), 501–513. <https://doi.org/10.26874/jakw.v6i2.540>
- Sitohang, L. L., & Purnomo, N. H. (2023). Sustainable tourism and local wisdom: A two-sided phenomenon of the implementation of Tri Hita Karana in tourism in Bali. *Jurnal Geografi*, 21(1), 1–18.
- Togatorop, T. T., Wijayanti, P. U., & Anggreini, I. G. A. A. L. (2022). Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan ekowisata Subak Sembung, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 11(2), 864–876. <https://doi.org/10.24843/JAA.2022.v11.i02.p36>
- UNESCO. (2012). Cultural landscape of Bali Province: The Subak system as a manifestation of the Tri Hita Karana philosophy. <https://whc.unesco.org/en/list/1194/>
- Vickers, A. (2012). *Bali: A paradise created* (2nd ed.). Tuttle Publishing.
- Wayan, N., Rusadi, P., Pitana, I. G., Sunarta, I. N., & Sukma, I. N. (2023). Development of Subak Lestari as a sustainable tourism attraction in Denpasar City. *International Journal of Green Tourism Research and Applications*, 5(2), 114–128. <https://doi.org/10.31940/ijogtra.v5i2.114-128>
- Wiguna, I. P. P., Sudarta, W., & Diarta, I. K. S. (2018). Model diversifikasi fungsi Subak sebagai daya tarik ekowisata di Subak Sembung, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 7(4), 542–551. <https://doi.org/10.24843/JAA.2018.v07.i04.p09>
- Wijayanti, P. U., Windia, W., Darmawan, D. P., & Widhianthini, W. (2020). Sustainable development model of Subak in Denpasar City. *International Journal of Life Sciences*, 4(1), 109–117. <https://doi.org/10.29332/ijls.v4n1.418>
- Windia, W., Suamba, I. K., Sumiyati, S., & Tika, W. (2018). Sistem Subak untuk pengembangan lingkungan yang berlandaskan Tri Hita Karana. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12(1), 118–129. <https://doi.org/10.24843/SOCA.2018.v12.i01.p10>
- Yastrawan, I. G. N. M., Suamba, I. K., & Sarjana, I. M. (2022). Perilaku petani terhadap pelaksanaan Tri Hita Karana dalam upaya pelestarian Subak daerah pariwisata (Kasus Subak Andong, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 11(2), 747–753.
- Yunita, I. M., Agung, A. A., Sugiantiningsih, P., Noor, M., Misno, I. M. G. R., et al. (2022). Rekonstruksi Subak Lestari Desa Anggabaya sebagai warisan budaya dunia dalam mewujudkan pencapaian ketahanan pangan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(3), 367–373.
- Darayasa, I. M. (2026, February 26). Perubahan praktik pengelolaan Subak Sembung (Personal interview).
- Winartha, I. W. (2026, February 28). Strategi pengembangan ekowisata Subak Sembung (Personal interview).